

**Teologi Publik Berdasarkan Pancasila:
Revitalisasi Pancasila dan Upaya Membangun Teologi Publik dalam Konteks
Indonesia Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017**



oleh:

Hendy Abisatya Wibawa

01120018

**SKRIPSI UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM MENCAPAI GELAR
SARJANA PADA FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**Yogyakarta
04 Januari 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

Teologi Publik Berdasarkan Pancasila:

**Revitalisasi Pancasila dan Upaya Membangun Teologi Publik dalam Konteks Indonesia
Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Hendy Abisatya Wibawa

01120018

Dalam Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologi Fakultas Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana
dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Sains Teologi pada tanggal 16 Januari 2018

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Disahkan oleh:

Dosen

1. Pdt. Hendri Mulyana Sendjaja, M.Hum., Lic. Th
2. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D
3. Dr. Kees de Jong

Tanda Tangan




Dekan



Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D

Kepala Program Studi



Jeniffer Fresy Porielly Wowor, M.A

PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi dengan judul **Teologi Publik Berdasarkan Pancasila: Revitalisasi Pancasila dan Upaya Membangun Teologi Publik dalam Konteks Indonesia Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017** ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 4 Januari 2018



Hendy Abisatya Wibawa

KATA PENGANTAR

Bila sebuah proses berteologi disebut sebagai sebuah pencarian, maka penulis setuju bila dalam prosesnya tidaklah dapat terpaku pada titik yang disebut akhir, tidak pula pada sebuah hasil. Dengan demikian berteologi tidak lagi soal bagaimana mengandaikan rumusan-rumusan tentang kebenaran yang final, melainkan bagaimana melihat sebuah langit yang mencerahkan, menghirup udara yang menyegarkan, bahkan memasuki kegelapan yang menakutkan. Setapak demi setapak, langkah demi langkah berlalu tidaklah selalu soal sesuatu yang menyenangkan ataupun melegakan. Bukan soal kepuasan, malah semuanya harus bermula dari sebuah kegelisahan. Demikian bahwa seluruhnya hanyalah sebuah pencarian yang tanpa batas.

Ketika penulis menyusun karya ini, paradigma pencarian merupakan hal yang sangat mendasar. Kegelisahan demi kegelisahan yang semula menjadi gangguan, pada gilirannya justru menjadi pintu masuk bagi penemuan akan kesadaran baru dalam sebuah realitas. Dan bagi penulis, dalam realitas itulah kesadaran akan karya Allah senantiasa selalu menjadi poros dari penghayatan yang berdinamika dan panjang. Untuk itu sebuah pencarian tak ubahnya sebuah upaya untuk membuka ruang-ruang baru bagi kesadaran akan Allah yang tidak pernah berhenti pada sebuah titik. Dengan demikian, pencarian yang penuh dengan kekhawatiran dan menggelisahkan itulah justru memuat makna pembebasan, sehingga setiap fase dari penghayatan akan karya Allah, yang salah satu protretnya ada dalam karya ini, tidak akan terlepas dari lika-liku realitas yang mengelilinginya.

Untuk itu, pertama-tama penulis berterima kasih kepada keluarga, kepada Papa dan Mama, Danianta Wibawa dan Miryam Tutik Winarni, yang dari merekalah setiap sifat dan detail pengajaran berharga teraktualisasikan dalam diri penulis. Setiap motivasi dan spirit tidak lepas dari peran mereka yang mendampingi penulis dalam bertumbuh, tentunya dengan sukacita yang selalu nyata dirasakan. Tentu dari mereka pula, penulis dapat terdorong dan berdaya dalam belajar di berbagai situasi. Dari titik terendah dan setiap kesalahan, hingga ke titik tertinggi bagaimana makna cinta kasih senantiasa meneguhkan setiap langkah dan proses. Untuk Moses Wisnu Wibowo, seorang adik yang selalu memberi suasana yang menyenangkan ketika penulis berada di rumah, juga dengan senantiasa menemani pada saat detik-detik pengumpulan skripsi.

Selanjutnya, penulis juga berterima kasih kepada Pdt. Hendri Mulyana Sendjaja, M.Hum., Lic. Th, selaku dosen pembimbing yang, selalu menjadi teladan dan mengajarkan tentang bagaimana

bersemangat dan bagaimana belajar. Bagi penulis, beliau bagaikan malaikat tak bersayap, karena berkat belas kasihan dari beliau penulis menemukan kembali semangat untuk menulis skripsi setelah mengalami kegagalan pada proses penyusunan skripsi sebelumnya.

Penulis juga banyak berterima kasih kepada yang terkasih, Theresia Dima. Walaupun perjuangan untuk sekedar bertahan bersama tidak mudah, namun kesabaran dan kesetiiaannya memberikan semangat yang terus membara, baik pada saat penulis mengalami masa-masa terburuknya selama masa perkuliahan. Penulis juga berterimakasih pada Mama Itje Makatita yang juga selalu memberikan semangat agar penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan proses perkuliahannya. Juga tidak lupa kepada kak Dadi dan kak Lusi yang selalu memberikan perhatian layaknya seorang kakak bagi penulis.

Pun hingga titik ini penulis merasa masih harus berterimakasih kepada banyak pihak oleh karena setiap detik dan momen adalah bagian-bagian yang saling terjalin dalam pertemuan-pertemuan, relasi dan, bahkan, konflik. Kak Nicholas dan kak Liliane yang penulis sudah anggap seperti kakak kandung, yang selalu memberikan motivasi dan semangat juga selalu membimbing penulis agar mengerti pada suatu batasan ketika penulis berproses di Yogyakarta. Anggota dan simpatisan dari "kontrakan cantel", Mario Gunawan, Firman Samosir, Topan Permadi, Yunatan Susula, Yonatan Adi Wijaya, Modi Tiko, Brahmana Duta Dewa, Fran Wilson, Hizkia Evan, Bikha Manda, Samuel Prayogo, Adit Manumpil, Efraim Larope, Ellisa Kbarek, Ian Macpal, Dicky Bali, Anugrah Sihaloho, Ayunistya Prawira, Yuniati Lomi, Marianna Devi, yang selalu memberi warna yang berbeda bagi kehidupan penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan. Juga kepada kolega satu sinode GKJ, Widhewani Suandi, Hizkia Fredo, Ardi Tulus, Samuel Prayogo, Ignatius Pambudi, yang selama penulis berproses semasa kuliah selalu memberi semangat agar dapat menyelesaikan proses perkuliahan.

Demikian, sekalipun penulis menyadari akan keterbatasan dari karya ini, penulis berharap bahwa karya ini dapat menjadi sumbangan yang berguna dan bermanfaat, bagi siapa saja yang hendak belajar, berdiskursus dan menghayati karya Allah. Tidak menutup ruang bahwa keberadaan berbagai perspektif yang dapat memberikan masukan dan kritik bagi karya ini.

Yogyakarta, Desember 2017

Hendy Abisatya Wibawa

ABSTRAK

Teologi Publik Berdasarkan Pancasila:

Revitalisasi Pancasila dan Upaya Membangun Teologi Publik dalam Konteks Indonesia

Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017

Oleh: Hendy Abisatya Wibawa (01120018)

Belakangan, proses berdemokrasi di Indonesia mengalami suatu kemunduran dengan munculnya politik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) khususnya terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal tersebut sejatinya memperlihatkan bagaimana proses berdemokrasi di Indonesia masih jauh dari esensinya, sehingga cita-cita kebebasan yakni manusia sebagai subyek yang bereksistensi belum juga dapat terwujud. Dalam konteks inilah pembicaraan akan sebuah alternatif guna mewujudkan kebebasan manusia menjadi penting bagi kehidupan iman Kristen, terutama kesadarannya sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Untuk itu, rekonstruksi teologis yang mengelaborasi ide teologi publik melalui pemikiran Paul S. Chung dengan analisis-deskriptif Pancasila melalui pemikiran Yudi Latif pun diajukan sebagai pertimbangan bagi persoalan tersebut. Hal yang dapat dilihat adalah, baik teologi publik maupun Pancasila memiliki kesamaan dalam memuat makna kebebasan eksistensi manusia. Keduanya memuat sebuah visi emansipasi yang menghidupkan semangat transformatif untuk melahirkan kebebasan manusia sebagai subyek yang bereksistensi.

Demikian upaya rekonstruksi teologis dipahami sebagai sebuah upaya untuk memaknai kembali sebuah ide teologis dalam konteks tertentu, sehingga dapat mendukung sebuah penghayatan iman yang relevan dalam situasi tertentu. Hal ini penting oleh karena rekonstruksi teologis bukan hanya berusaha menjawab sebuah persoalan secara relevan, namun lebih lagi, upaya rekonstruksi teologis dapat melahirkan makna yang memberi kekuatan transformatif. Dengan demikian, secara khusus konstruksi teologi publik berdasarkan Pancasila dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan mengupayakan perbaikan situasi.

Kata-kata Kunci: Teologi Publik, Pancasila, Yudi Latif, Paul S. Chung, Pilkada DKI 2017

Dosen Pembimbing:

Pdt. Hendri Mulyana Sendjaja, M.Hum., Lic. Th

ABSTRACT

Public Theology Based on Pancasila:

Revitalization of Pancasila and the Efforts to Construct Public Theology in the context of Indonesia Particularly at the Election of Jakarta Governor 2017

By: Hendy Abisatya Wibawa (01120018)

Later, the process of democracy in Indonesia today is struggling with the problems like black campaign issue particularly at the Election of Jakarta Governor 2017. This situation showed us how the process of democracy in Indonesia is far from its essence, so the dream of freedom, which is human existence as subject not yet actualized. In this context, a discussion about alternative to build and to actualize of humanity freedom to be an important thing for Christian faith daily life, mainly in the consciousness as the part of democratic life in Indonesia.

Therefore, theological reconstruction that elaborate theological idea about public theology through Paul S. Chung's consideration with Pancasila-descriptive analysis by Yudi Latif proposed as an alternative. The point is, both public theology through Paul S. Chung's consideration and the concept of Pancasila accommodate the meaning of freedom of humanity existence and also accommodate an emancipation vision that vitalize transformative spirit to bring forth human freedom as existence subject.

Thereby theological reconstruction effort understands as an effort to reinterpret a theological idea in specific context, so that can support a relevant faith appreciation in specific situation. It is important because, theological reconstruction not only try to answer a problem relevantly, more than that theological reconstruction effort can bring forth or make a meaning that brings transformative spirit. Thereby, specifically the construction of public theology based on Pancasila can give a contribution to democratic life in Indonesia context, and one of them tried to fixed the situation.

Keywords: Public Theology, Pancasila, Yudi Latif, Paul S. Chung, Election of Jakarta Governor 2017

Supervisor:

Rev. Hendri Mulyana Sendjaja, M.Hum., Lic. Th

Daftar Isi Skripsi

| | |
|---|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | II |
| PERNYATAAN INTEGRITAS..... | III |
| KATA PENGANTAR..... | IV |
| ABSTRAK..... | VI |
| DAFTAR ISI..... | VIII |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 1.1 Deskripsi Analisis Pancasila sebagai Ideologi Bernegara Bangsa Indonesia berdasarkan Pemikiran Yudi Latif | 4 |
| 1.2 Teologi Ruang Publik berdasarkan Pemikiran Paul S. Chung..... | 7 |
| 2. Rumusan Masalah..... | 9 |
| 3. Tujuan Penulisan..... | 9 |
| 4. Judul Penulisan..... | 10 |
| 5. Metode Penelitian..... | 10 |
| 6. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II | 11 |
| 2.1 Ideologi Sebagai Landasan Tata Hukum yang Mengatur Kehidupan Bersama..... | 11 |
| 2.1.1 Idealisme, Ideologi dan Utopia..... | 11 |
| 2.1.2 Fungsi Ideologi Bagi Suatu Negara..... | 13 |
| 2.1.3 Macam-macam Ideologi Suatu Negara..... | 15 |
| 2.2 Memaknai Pancasila Secara Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas berdasarkan Pemikiran Yudi Latif..... | 20 |
| 2.2.1. Biografi singkat Yudi Latif..... | 20 |
| 2.2.2. Fase-fase dalam proses perumusan Pancasila..... | 21 |
| 2.2.3. Pokok-pokok Moralitas dan haluan Kebangsaan-kenegaraan..... | 25 |
| 2.2.4. Deskripsi-analisa Pancasila terkait posisinya dalam ranah public kebangsaan berdasarkan pemikiran Yudi Latif..... | 36 |
| 2.3 Kesimpulan..... | 45 |
| BAB III | 46 |

| | |
|---|-----------|
| 3.1 Pengantar..... | 47 |
| 3.2 Biografi Singkat Paul S. Chung..... | 47 |
| 3.3 Misi Allah dalam Mencapai Keadilan Sosial-Ekonomi Global | 48 |
| 3.4 Misi Allah dalam Kemajemukan | 50 |
| 3.5 Teologi Interkultural sebagai Misi Kenabian dalam Narasi Allah | 53 |
| 3.6 Kesimpulan..... | 54 |
| BAB IV..... | 55 |
| 4.1 Pengantar..... | 55 |
| 4.2 Kondisi Masyarakat DKI Jakarta Pasca Pilkada DKI | 55 |
| 4.3 Analisa gambaran negatif kondisi masyarakat DKI Jakarta Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan menggunakan deskripsi-analisa Pancasila berdasarkan pemikiran Yudi Latif..... | 57 |
| 4.3.1 Analisa kondisi masyarakat DKI Jakarta terkait dengan nilai “ketuhanan” dalam kerangka Pancasila khususnya sila pertama..... | 57 |
| 4.3.2 Analisa kondisi masyarakat DKI Jakarta terkait dengan nilai “kemanusiaan” dalam kerangka Pancasila khususnya sila kedua | 58 |
| 4.3.3 Analisa kondisi masyarakat DKI Jakarta terkait dengan nilai “persatuan” dalam kerangka Pancasila khususnya sila ketiga..... | 59 |
| 4.3.4 Analisa kondisi masyarakat DKI Jakarta terkait dengan nilai “permusyawaratan” dalam kerangka Pancasila khususnya sila keempat..... | 61 |
| 4.3.5 Analisa kondisi masyarakat DKI Jakarta terkait dengan nilai “keadilan sosial” dalam kerangka Pancasila khususnya sila kelima..... | 62 |
| 4.4 Analisa gambaran negatif kondisi masyarakat DKI Jakarta Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 dalam perspektif teologi publik berdasarkan pemikiran Paul S. Chung..... | 63 |
| 4.5 Kesimpulan: Teologi publik berdasarkan Pancasila..... | 65 |
| BAB V | 68 |
| 5.1 Pengantar | 68 |
| 5.2 Kesimpulan keseluruhan..... | 68 |
| 5.3 Refleksi teologis dengan melihat relevansi penghayatan iman Kristen berdasarkan Pancasila | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 72 |

ABSTRAK

Teologi Publik Berdasarkan Pancasila:

Revitalisasi Pancasila dan Upaya Membangun Teologi Publik dalam Konteks Indonesia

Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017

Oleh: Hendy Abisatya Wibawa (01120018)

Belakangan, proses berdemokrasi di Indonesia mengalami suatu kemunduran dengan munculnya politik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) khususnya terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal tersebut sejatinya memperlihatkan bagaimana proses berdemokrasi di Indonesia masih jauh dari esensinya, sehingga cita-cita kebebasan yakni manusia sebagai subyek yang bereksistensi belum juga dapat terwujud. Dalam konteks inilah pembicaraan akan sebuah alternatif guna mewujudkan kebebasan manusia menjadi penting bagi kehidupan iman Kristen, terutama kesadarannya sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Untuk itu, rekonstruksi teologis yang mengelaborasi ide teologi publik melalui pemikiran Paul S. Chung dengan analisis-deskriptif Pancasila melalui pemikiran Yudi Latif pun diajukan sebagai pertimbangan bagi persoalan tersebut. Hal yang dapat dilihat adalah, baik teologi publik maupun Pancasila memiliki kesamaan dalam memuat makna kebebasan eksistensi manusia. Keduanya memuat sebuah visi emansipasi yang menghidupkan semangat transformatif untuk melahirkan kebebasan manusia sebagai subyek yang bereksistensi.

Demikian upaya rekonstruksi teologis dipahami sebagai sebuah upaya untuk memaknai kembali sebuah ide teologis dalam konteks tertentu, sehingga dapat mendukung sebuah penghayatan iman yang relevan dalam situasi tertentu. Hal ini penting oleh karena rekonstruksi teologis bukan hanya berusaha menjawab sebuah persoalan secara relevan, namun lebih lagi, upaya rekonstruksi teologis dapat melahirkan makna yang memberi kekuatan transformatif. Dengan demikian, secara khusus konstruksi teologi publik berdasarkan Pancasila dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan mengupayakan perbaikan situasi.

Kata-kata Kunci: Teologi Publik, Pancasila, Yudi Latif, Paul S. Chung, Pilkada DKI 2017

Dosen Pembimbing:

Pdt. Hendri Mulyana Sendjaja, M.Hum., Lic. Th

ABSTRACT

Public Theology Based on Pancasila:

Revitalization of Pancasila and the Efforts to Construct Public Theology in the context of Indonesia Particularly at the Election of Jakarta Governor 2017

By: Hendy Abisatya Wibawa (01120018)

Later, the process of democracy in Indonesia today is struggling with the problems like black campaign issue particularly at the Election of Jakarta Governor 2017. This situation showed us how the process of democracy in Indonesia is far from its essence, so the dream of freedom, which is human existence as subject not yet actualized. In this context, a discussion about alternative to build and to actualize of humanity freedom to be an important thing for Christian faith daily life, mainly in the consciousness as the part of democratic life in Indonesia.

Therefore, theological reconstruction that elaborate theological idea about public theology through Paul S. Chung's consideration with Pancasila-descriptive analysis by Yudi Latif proposed as an alternative. The point is, both public theology through Paul S. Chung's consideration and the concept of Pancasila accommodate the meaning of freedom of humanity existence and also accommodate an emancipation vision that vitalize transformative spirit to bring forth human freedom as existence subject.

Thereby theological reconstruction effort understands as an effort to reinterpret a theological idea in specific context, so that can support a relevant faith appreciation in specific situation. It is important because, theological reconstruction not only try to answer a problem relevantly, more than that theological reconstruction effort can bring forth or make a meaning that brings transformative spirit. Thereby, specifically the construction of public theology based on Pancasila can give a contribution to democratic life in Indonesia context, and one of them tried to fixed the situation.

Keywords: Public Theology, Pancasila, Yudi Latif, Paul S. Chung, Election of Jakarta Governor 2017

Supervisor:

Rev. Hendri Mulyana Sendjaja, M.Hum., Lic. Th

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk kedalam kategori negara dunia ketiga atau yang dikenal sebagai negara-negara berkembang. Sehingga permasalahan kesejahteraan umum terutama terkait sosial dan ekonomi masih menjadi problematika yang panjang bagi negara-negara yang dikatakan sebagai negara berkembang, termasuk di dalamnya bangsa Indonesia. Baru-baru ini di Indonesia terjadi sebuah event besar yang menimbulkan gejolak dalam kehidupan bernegara di Indonesia yaitu Pilkada DKI Jakarta 2017. Pilkada yang mempertemukan pasangan calon gubernur Agus-Sylvi, Ahok-Djarot, dan Anies-Sandi merupakan pilkada DKI yang menurut berbagai golongan masyarakat merupakan pilkada yang terpanas.

Proses kontestasi politik dalam rangka Pilgub DKI Jakarta begitu panas, diwarnai dengan aksi-aksi individu atau kelompok yang kontradiktif dengan esensi tujuan Pilkada itu sendiri. Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah proses mencari pemimpin Jakarta yang punya kemampuan untuk bekerja sebagai pemimpin yang amanah, mencari pemimpin yang punya komitmen untuk menciptakan kemajuan bagi daerah yang dipimpinnya. Ini adalah bentuk demokrasi di mana seluruh penduduk Jakarta yang memiliki hak pilih dilibatkan dalam memilih siapa pemimpin yang mereka inginkan.

Namun yang menjadi sorotan dan kemudian menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengangkat topik ini di dalam skripsi adalah dikarenakan adanya pertarungan ideologi antara nasionalis dan religius, seperti yang terdapat dalam ulasan dari seword.com;

”Ajang Pilgub DKI Jakarta 2017 telah menjadi ajang pertarungan hebat ideologi nasionalis versus religius, ajang pertarungan antar koalisi partai-partai politik besar, menyita banyak perhatian publik nasional dan internasional. Pilgub DKI Jakarta 2017 telah menjadi Pilkada paling mahal karena gejolak-gejolak politik yang terjadi di dalamnya mengarah pada perpecahan bangsa. Isu-isu SARA telah dimainkan begitu cantik, hampir tak terlihat, perangkap maut dibalik kasus dugaan penistaan agama, demo-demo

*yang saling menunggangi antara kepentingan politik praktis parta-partai yang haus kemenangan dan misi kelompok radikal dalam memperjuangkan ideologinya”.*¹

Pilkada DKI 2017 yang merupakan pilkada terpanas, namun juga menurut beberapa pengamat politik merupakan pilkada dengan kualitas persaingan terburuk. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa dalam pilkada ini hasil kerja bukan merupakan hal yang utama. Dalam masa kampanye setiap kubu melakukan penyerangan dengan gayanya masing-masing. Salah satu kompetitor yaitu pasangan Ahok-Djarot yang berstatus sebagai petahana memang jika dilihat dari *track record* yang mereka miliki menjadi unggulan dibanding pasangan lainnya. Namun, hal tersebut bukan menjadi yang utama dalam pilkada ini.

Beberapa kalangan menilai pertarungan ini tampaknya adalah konfrontasi tak langsung antara dua kelompok yang berseberangan. Di satu sisi kelompok Islamis konservatif, yang diduga didukung oleh mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang mencalonkan putranya, Agus Hartimurti Yudhoyono sebagai kandidat gubernur DKI Jakarta. Melawan kelompok sekularis dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di sisi lainnya, yang disimbolkan oleh sosok Ahok.²

Yang menjadi perhatian publik pada Pilkada DKI 2017 ini adalah penggunaan isu SARA sebagai strategi untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon. Ahok yang merupakan keturunan Tionghoa dan beragama Kristen menjadi target dari penggunaan isu SARA. Hal ini terkait ungkapan Ahok ketika menjadi pembicara di Kepulauan Seribu yang mengkritisi penggunaan isu SARA dalam pemilu baik berskala daerah maupun nasional. Ahok mengatakan “*Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu*”.³

Kritik Ahok terkait hal ini yang kemudian digunakan oleh lawan politiknya untuk menjatuhkan beliau. Demo besar-besaran yang dilakukan dengan mengatasnamakan umat muslim kemudian berlangsung meminta agar Ahok dipenjara. Isu SARA yang digunakan tidak hanya sebatas tertuju

¹ Diambil dari seword.com/sosbud/menyimak-fenomena-ahok-dalam-pilgub-dki-jakarta-2017/ oleh Beni Guntarman yang diakses pada tanggal 10 Juli 2017

² <http://www.dw.com/id/pilkada-jakarta-tolok-ukur-pertarungan-politik-jelang-pemilu-nasional/a-37531492> yang diakses pada tanggal 10 Juli 2017

³ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601> yang diakses pada tanggal 10 Juli 2017

pada Ahok, melainkan juga pendukungnya. Penganut Islam garis keras yang menurut pengamat politik telah ditunggangi beberapa partai politik pesaing Ahok bahkan sampai membuat gerakan-gerakan di beberapa Mesjid untuk tidak menyolatkan jenazah pendukung Ahok yang beragama Muslim. Selain hal tersebut, banyak juga kotbah-kotbah di Mesjid yang mengatakan bahwa menjadi suatu keharaman bagi umat Muslim untuk memilih pemimpin yang non-Muslim yang diistilahkan sebagai Kafir.⁴ Menurut penulis hal-hal seperti inilah yang menjadi faktor pendukung intoleransi antar umat beragama dan juga radikalisme umat beragama. Ulama-ulama atau pemimpin umat beragama yang seharusnya dapat meredam perpecahan justru menggunakan kesempatan kotbahnya untuk membuat perpecahan antar umat beragama.

Intoleransi dan radikalisme ternyata tidak berhenti setelah Ahok gagal memenangi pilkada DKI Jakarta 2017. Demo berkelanjutan dilakukan hanya untuk memasukan Ahok ke penjara. Para demonstran yang sudah ditunggangi oleh aktor-aktor politik menggunakan Pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama sebagai landasan hukum yang kemudian berhasil menjadi landasan untuk memenjarakan Ahok. Meski di kemudian hari banyak masyarakat yang mengkritisi landasan hukum tersebut karena dinilai sebagai “pasal karet”, karena dianggap bisa disalahgunakan seperti yang terjadi pada kasus Ahok.⁵

Pilkada DKI 2017 ternyata telah merusak makna kebhinekaan dan ideologi Pancasila. Isu-isu intoleransi dan radikalisme nyatanya merupakan perusak makna kebhinekaan dan makna ideologi Pancasila. Untuk menjaga esensi ideologi Pancasila, presiden Jokowi membentuk sebuah unit kerja baru yang memfokuskan pada pembinaan ideologi Pancasila yang dikenal sebagai UKP-PIP yang dipimpin oleh Yudi Latif.⁶

Pancasila yang sudah puluhan tahun menjadi ideologi bangsa Indonesia memang beberapa kali mengalami gangguan, paling baru adalah akhir-akhir ini pasca pilkada DKI Jakarta, di mana beberapa pihak ingin hukum dan ideologi berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum dan ideologi salah satu Agama. Untuk dapat memahami bagaimana Pancasila menjadi ideologi bangsa

⁴ Diambil dari seword.com/sosbud/menyimak-fenomena-ahok-dalam-pilgub-dki-jakarta-2017/ oleh Beni Guntarman yang diakses pada tanggal 10 Juli 2017

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170514180107-20-214749/masyarakat-indonesia-di-canberra-hapus-pasal-penodaan-agama> yang diakses pada tanggal 10 Juli 2017

⁶ <http://news.liputan6.com/read/2981554/jurus-jokowi-menjaga-pancasila> yang diakses pada tanggal 10 Juli 2016

Indonesia dan esensi di dalamnya, penulis menggunakan pemikiran Yudi Latif sebagai sebuah landasan pemahaman terkait Pancasila.

1.1 Deskripsi-analisis Pancasila sebagai ideologi bernegara bangsa Indonesia berdasarkan pemikiran Yudi Latif

Pancasila hingga saat ini tentunya masih relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan adanya dua alasan, yaitu: pertama, Pancasila masih tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 sehingga dalam menjalankan program-program kenegaraan, pemerintah diharuskan untuk taat kepada nilai-nilai Pancasila, yang kedua, karena Soekarno sebagai salah satu pencetus Pancasila telah melakukan hypostasis mengenai kompleks kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat kental dengan keaneka-ragaman. Untuk alasan yang kedua ini haruslah dipandang sebagai sebuah perjuangan untuk menempatkan keaneka-ragaman masyarakat Indonesia dan kebudayaan-kebudayaannya ke bawah naungan satu atap kenegaraan yang modern.⁷

Dalam proses perumusan Pancasila itu sendiri, menurut pandangan beberapa ahli seperti Kahin maupun Bernhard Dahm, Soekarno diyakini melakukan sintesa antara beberapa ideology di dunia seperti nasionalisme, Islamisme dan Marxisme yang kemudian dikontekstualisasikan berdasarkan keadaan yang ada di Indonesia. Sehingga hakikat dari Pancasila itu sendiri adalah untuk mempersatukan rakyat Indonesia walau terdiri dari kebelbagaian suku dan bahasa, kemudian menjunjung tinggi kemenangan kaum tertindas dalam perjuangan melawan kapitalisme, dan juga bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan prinsip ketuhanan.⁸

Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara yang dipahami sebagai sistem filsafat bangsa yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa. Sebagai ideologi, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Ideology sendiri pada hakikatnya merupakan suatu hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Kusumohamidjojo berdasarkan pemikiran Karl

⁷ Budiono Kusumohamidjojo. 2014. *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*. Yogyakarta: Jalasutra. Hlm 228

⁸ Suwarno, P. J. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 96

Mannheim, mengatakan bahwa ideology merupakan suatu pandangan yang mengusahakan adanya sebuah jawaban dari hal-hal yang terjadi, yang secara *de facto* tidak atau belum pernah menjadi realitas sesuai dengan yang dikehendaki oleh subjek (baca: pencetus ideology).⁹

Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Adapun fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk memisahkan kita dari mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Apabila dibandingkan dengan agama, agama berfungsi juga mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi.

Soekarno sebagai salah satu bapak perumus Pancasila sangat meyakini bahwa Pancasila sebagai sebuah ideology berbangsa dan bernegara dapat digunakan sebagai sebuah sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan sebagai hakikatnya Pancasila dapat digunakan sebagai senjata untuk melawan musuh bersama rakyat Indonesia selama puluhan tahun yaitu imperialisme. Dan sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila diyakini memiliki sebuah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.¹⁰

Yudi Latif mengungkapkan “pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan”¹¹ menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertical-transedental dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Latif menekankan bahwa Indonesia bukan sebagai negara sekuler yang ekstrem yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke dalam ruang privat/komunitas. Melainkan negara mampu untuk melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan bisa memainkan peran public yang berkaitan dengan penguatan etika sosial.

⁹ Budiono Kusumohamidjojo. 2014. *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*. Yogyakarta: Jalasutra. Hlm 161

¹⁰ Yudi Latif. 2015. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia. Hlm. 40

¹¹ *Ibid*, *Negara Paripurna*. Hlm. 42-44

Disaat yang sama, Indonesia juga bukanlah “negara agama”, yang hanya merepresentasikan salah satu agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara. Indonesia harus tetap menjunjung tinggi kepelbagaian agama yang berada di Indonesia

2. Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, Indonesia diharapkan untuk aktif dalam melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedalam, bangsa Indonesia diharapkan untuk mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”.
3. Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Bangsa Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keberagaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing, yang dalam teori tentang kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif “etnosimbolis”, yang memadukan antara perspektif “modernis” yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan, dengan perspektif “primodalis” dan “perenialis”, yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan.
4. Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka “musyawarah-mufakat”, yang dalam pengambilan keputusannya tidak didikte oleh golongan mayorokrasi maupun minorokrasi, melainkan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberative dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

5. Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperative etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk idividu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan hak politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana kehidupan sosial-ekonomi yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setelah memahami bagaimana makna Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia, penulis kemudian ingin memahami bagaimana kekristenan dalam kaitannya teologi Kristen berbicara maupun mengambil sikap di tengah-tengah konteks masyarakat Indonesia. Dalam hal ini penulis akan menggunakan alam pemikiran Paul S. Chung terkait teologi publik.

1.2 Teologi ruang publik berdasarkan pemikiran Paul S. Chung

Umat Kristen di masa sekarang berada di tengah-tengah konteks masyarakat yang modern. Sehingga isu-isu dan fenomena yang terjadi pada konteks masyarakat di mana umat Kristen berada menjadi hal yang sangat penting untuk dimaknai dan dihidupi. Konteks masyarakat modern di mana isu-isu seperti kemanusiaan, toleransi antar umat beragama, dan kehidupan bersama dalam kepelbagaian kultur dan budaya hadir dan menjadi bagian dari kehidupan umat Kristen di masa sekarang.

Paul S. Chung mengatakan bahwa, teologi Kristen merupakan ilmu yang secara kritis menafsirkan pernyataan Allah yang kemudian menjadi pedoman hidup dalam pengaplikasian iman Kristen dan juga sebagai penegasan dari pernyataan Allah. Chung mengungkapkan, teologi sebagai sebuah

misteri tentang Allah yang berbicara melalui injil dan gereja, terdapat lingkaran hermeneutis di antara teologi dan kehidupan bergereja. Teologi muncul dari hasil refleksi yang dihasilkan gereja dalam perjalanan kehidupan misinya di dunia. Sedangkan teologi Kristen yang berpedoman pada pernyataan Allah dan sakramen kehidupan bergereja, membawa pesan universal dari injil dan kehidupan bersekutu, pemujaan dan pelayanan yang menjadi satu-kesatuan di dalam ranah publik. Dimensi kehidupan bergereja dari teologi itu sendiri dilengkapi oleh kehidupan masyarakat di ranah publik. Dan Roh Kudus menjadi bagian dari iman dan sebagai pedoman hidup bagi umat Kristiani sebagai gereja yang melayani. Chung juga mengatakan bahwa misi umat Kristen sebagaimana yang tertulis di dalam injil adalah turut serta dalam kehidupan sosial di mana mereka hidup sebagai perwujudan dari kehadiran Allah.¹²

Menurut Chung jika umat Kristiani masih berpaku pada konsep *missio Dei* klasik, maka umat Kristen sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman atau dalam kata lain ketinggalan jaman. Hal ini dikarenakan konsep tersebut terpisah dari sebuah usaha hermeneutis dalam sebuah konteks kehidupan antar-budaya, kemudian juga isu-isu pada ranah kehidupan bermasyarakat dan ekologi, lalu kehidupan umat di luar Kekristenan, dan juga dialog antar ilmu antara ilmu sosial dan ilmu alam.¹³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa teologi publik mengantar umat Kristiani untuk secara lebih dalam dan lebih tajam untuk dapat merefleksikan sebuah teologi yang dihasilkan melalui perjumpaan-perjumpaan dengan kehidupan di luar umat Kristen itu sendiri, dalam hal ini adalah isu-isu sosial-politik yang terjadi di dalamnya dan juga fenomena sosio-ekonomi yang berlangsung pada masyarakat sekitar.

Jurgen Habermas sebagai salah satu dari para tokoh yang berada pada bidang ini mengeksplorasi signifikansi dari teori komunikatif yang kritis terhadap teologi ruang publik. Jika opini publik dapat diciptakan melalui kehidupan sosial, maka ranah publik menjadi suatu tempat yang dapat menjadikan pembicaraan antar anggota suatu komunitas atau masyarakat, yang kemudian memperbolehkan mereka untuk membuat suatu opini publik. Disinilah letak esensi untuk memahami pemahaman komunikasi dan rasionalitas yang juga memiliki signifikansi dan nilai bagi kehidupan publik dan karakter dari teologi Kristen.¹⁴ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

¹² Paul. S Chung. 2010. *Public Theology in an Age of World Christianity*. New York: St. Martin's press LLC hlm. 1

¹³ *Ibid*, hlm. 2

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3

banyaknya dimensi yang melekat pada wilayah publik, maka teologi ranah publik sendiri tidak akan dapat berdiri secara mandiri jika tidak mengacu pada lingkup publik.

Di dalam kerangka yang berbeda dari teologi misi Kristen, teologi ranah publik menantang kehidupan bergereja yang lebih sempit dari misi umat Kristen yang secara mudah mengantarkan pada imperialisme kultural-gerejawi. Teologi ruang Publik akan muncul dalam interaksi atau korelasi antara penelitian teologis dan ilmu sosial. Hal ini juga mendorong agar terjadinya dialog dengan orang-orang yang berbeda agama dan berbeda kebudayaannya, mengambil nilai dari cakrawala kehidupan akan dimensi multikultural dan multireligius dalam komunitas publik. Konsep sosiologis yang terdapat pada masyarakat muncul sebagai kunci untuk memandu diskursus teologis antara sosial-politik dengan imajinasi serta analisis budaya linguistik.¹⁵

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, penulis kemudian merumuskan permasalahan dalam berupa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah upaya merevitalisasi Pancasila sebagai ideologi berbangsa dengan berlandaskan teologi ruang publik sebagaimana yang di ungkapkan oleh Paul S. Chung menjadi paradigma yang relevan bagi kekristenan dalam melihat realitas kehidupan berbangsa dan bernegara ?
2. Apakah merevitalisasi Pancasila sebagai ideologi berbangsa dengan berlandaskan teologi ruang publik sebagaimana yang di ungkapkan oleh Paul S. Chung dapat menjadi jawaban atas permasalahan terkait kondisi warga DKI Jakarta pasca pilkada 2017?

3. Tujuan Penulisan

Jelas bahwa maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini, bukan hanya menjadi kajian akademis, melainkan dapat menjadi sebuah potret kegelisahan gereja, sebagai bagian dari masyarakat Demokrasi Indonesia. Kemudian untuk memberikan sumbangsih pemikiran teologi kontekstual Kristiani dalam memahami dan memaknai kembali Pancasila sebagai ideologi bernegara melalui teologi ruang publik sebagaimana yang di ungkapkan oleh Paul S. Chung agar dapat menjadi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2

refleksi keberadaan iman Kristen, baik dalam konteks bergereja maupun di tengah ketegangan konteks pluralitas dan publik demokrasi di Indonesia.

4. Judul Penulisan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan judul:

Teologi Publik Berdasarkan Pancasila:

Revitalisasi Pancasila dan Upaya Membangun Teologi Publik dalam Konteks Indonesia Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017

Diharapkan judul ini dapat mencerminkan isi dari skripsi ini yang mencakup pembicaraan soal Pancasila dan teologi ruang publik.

5. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis dalam mengumpulkan data-data terkait topik penulisan ini akan menggunakan metode penelitian studi literatur, yaitu pengumpulan data berdasarkan wacana-wacana yang tertuang baik melalui sumber-sumber buku, jurnal, maupun artikel-artikel yang dapat ditemukan pada internet.

6. Sistematika Penulisan

BAB I: Berisikan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, judul penulisan, metode penelitian, sistematika penelitian, dan pustaka yang digunakan penulis.

BAB II: Analisa-deskriptif terkait Pancasila sebagai ideologi bernegara melalui pemikiran Yudi Latif

BAB III: Konsep Teologi ruang Publik berdasarkan pemikiran Paul S. Chung

BAB IV: Analisa teologi kontekstual Kristiani dalam memahami bagaimana teologi ruang publik dapat berbicara dalam konteks Indonesia yang dalam hal ini merevitalisasi pancasila pasca Pilkada DKI 2017

BAB V: Refleksi teologis dengan menggunakan tafsiran Alkitab, kemudian penutup.

BAB V

Penutup

5.1 Pengantar

Sampai pada Bab yang terakhir ini, penulis pun hendak menyajikan sebuah penutup atas hal-hal yang telah dikaji pada Bab-bab sebelumnya. Untuk itu, bagian penutup ini terdiri dari dua bagian, yakni kesimpulan, dan relevansi,. Yang pertama, penulis hendak memberikan sebuah kesimpulan yang merefleksikan berbagai persoalan yang telah dibahas dan menjadi temuan-temuan bagi penulis. Kemudian yang kedua, tentu saja refleksi yang dilakukan pun tidak kemudian melupakan konteks, di mana setiap refleksi memiliki pijakan yang relevan dalam sebuah situasi yang konkret.

5.2 Kesimpulan keseluruhan

Dua hal yang menjadi poin penting bagi kesimpulan di sini adalah, yang pertama, menjawab apakah upaya merevitalisasi Pancasila sebagai ideologi berbangsa dengan berlandaskan teologi ruang publik sebagaimana yang di ungkapkan oleh Paul S. Chung menjadi paradigma yang relevan bagi kekristenan dalam melihat realitas kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan yang kedua, adalah menjawab apakah merevitalisasi Pancasila sebagai ideologi berbangsa dengan berlandaskan teologi ruang publik sebagaimana yang di ungkapkan oleh Paul S. Chung dapat menjadi jawaban atas permasalahan terkait kondisi warga DKI Jakarta pasca pilkada 2017?

Pertama, penulis akan mencoba untuk menyimpulkan keseluruhan skripsi berdasarkan pertanyaan rumusan masalah yang pertama. Dua kunci yang terdapat pada poin ini adalah teologi Kristen sebagai landasan hidup antara umat Kristiani dengan Allah, kemudian yang kedua adalah dengan berada di Indonesia, umat Kristen dibebani tanggung jawab untuk mengamalkan ideologi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Kemudian dengan diupayakannya revitalisasi Pancasila dengan merekonsrusikannya dengan teologi publik, terlebih dengan teologi yang lahir dari pengalaman bangsa Indonesia itu sendiri tentunya menjadi sebuah paradigma yang sangat relevan bagi umat kristiani dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya untuk merespon hal-hal yang terjadi pasca pilkada DKI 2017. Hal-hal yang terjadi merupakan hal-hal yang sudah penulis paparkan baik dalam bab I maupun bab IV, yaitu munculnya diskriminasi golongan oleh kaum yang dikategorikan sebagai kaum mayoritas. Kemudian terdapat diskriminasi bagi umat

kristiani yang berlatar ras Tionghoa, karena selain diskriminasi mayoritas-minoritas beralasan agama, muncul juga diskriminasi berdasarkan suku yaitu pribumi dan non-pribumi. Relevansi bagi kehidupan umat Kristen di Indonesia adalah agar terhindar dari provokasi-provokasi yang akan merusak nilai-nilai persatuan sesama warga negara Indonesia.

Kunci kedua dalam kesimpulan yang akan dipaparkan oleh penulis terkait soal apakah yang telah dipaparkan penulis dalam skripsi ini dapat menjadi jawaban dengan melihat konteks Indonesia pasca Pilkada DKI Jakarta. Menurut penulis, apa yang telah dipaparkan diatas dapat menjadi salah satu jawaban untuk melihat dinamika perpolitikan Indonesia mengacu pada politik kotor yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pemahaman tentang Pancasila sebagaimana yang telah penulis paparkan berdasarkan pemikiran Yudi Latif menjadi suatu hal yang penting bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan untuk dapat hidup berbangsa dan bernegara sesuai yang telah dicitakan para pendiri bangsa. Kemudian pemikiran Paul S. Chung dapat memperkaya pemahaman akan kekristenan bagi umat Kristen di Indonesia dengan lebih sering melihat konteks sehari-hari dibandingkan konteks yang berada di Alkitab. Bukan saja lebih relevan, namun dengan memperhatikan konteks di sekitar kita dalam hal ini konteks Asia secara khusus Indonesia, umat Kristiani akan cenderung lebih menghidupi nilai-nilai kekristenan yang sudah dipoles atau dipertajam dengan konteks sehari-hari mereka. Sehingga umat Kristiani akan dapat lebih tajam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia.

5.3 Refleksi teologis dengan melihat relevansi penghayatan iman Kristen berdasarkan Pancasila

Untuk merefleksikan apa yang telah penulis paparkan diatas dengan menggunakan iman percaya, penulis akan mengangkat Roma 13:1-7 yang berbicara tentang hubungan antara umat percaya dengan negara tempat tinggalnya. Roma 13:1-7 berbunyi demikian:

13:1 Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. 13:2 Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. 13:3 Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari

padanya. 13:4 Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. 13:5 Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. 13:6 Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. 13:7 Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.

Nas ini merupakan penekanan oleh Rasul Paulus terkait perlunya kita sebagai warga negara untuk dapat taat terhadap pemerintah di atasnya. Fokus penulis ada pada ayat yang pertama. Rasul Paulus menekankan sebagai seorang Kristen kita juga harus taat terhadap kekuasaan pemerintah. Rasul Paulus memberikan argumentasinya, bahwa pemerintah pada belahan dunia manapun merupakan perpanjangan tangan Allah. Pertanyaan kritisnya adalah: mengapa Paulus bisa sampai berkesimpulan seperti itu? Manfred T Brauch dalam bukunya “ucapan Paulus yang sulit”, memberikan analisa yang menarik demikian: “kita perlu membaca nasihat-nasihat ini berdasarkan konteks aktifitas penginjilan Paulus, yang berlangsung di dalam sebuah dunia dimana hukum dan peraturan Romawi telah menciptakan kedamaian dan tata tertib secara relative yang menyebabkan penyebaran injil terjadi dengan cepat.”

Dengan kata yang sederhana, sebenarnya Paulus menasehati jemaat di kota Roma agar taat kepada pemerintah Roma pada waktu itu, karena pemerintah Roma dengan program Pax Romana-nya yang hebat itu telah berhasil mewujudkan suatu tata pemerintahan yang relative adil dan tertib bagi seluruh penduduknya. Oleh sebab itu pemerintahan yang demikian harus ditaati, sebab ia menjadi kepanjangan tangan dari Allah yang adalah Allah yang tertib dan teratur. Allah jelas tidak bisa menoleransi sebuah anarkhi (keadaan tanpa hukum dan peraturan).

Namun, lebih jauh Paulus bukan bermaksud untuk memerintahkan Jemaat Roma untuk patuh kepada Pemerintah. Kata “taat” dapat juga berarti “tidak memberontak”. Sehingga dapat dilihat bahwa Paulus tetap mengindahkan suatu elemen kemanusiaan, di mana manusia pada kodratnya memiliki kehendak bebas. Sehingga manusia dapat memilih untuk mengikuti atau tidak aturan dari sebuah konstitusi. Hanya pada ayat yang pertama terdapat penekanan bahwa sebagai suatu

komunitas yang berada di dalam suatu institusi Pemerintahan, hendaknya tidak berusaha untuk menggulingkan apa yang sudah berada pada Pemerintahan. Di atas penulis memaparkan bahwa Paulus menekankan sebuah Pemerintahan merupakan kepanjangan tangan dari Allah. Pax Romana pada masa jemaat di Roma bila dilihat padanannya adalah apa yang terjadi pada masa Orde Baru, di mana perdamaian dan keteraturan dicapai melalui represi kekuatan militer. Ketaatan pada Pemerintah bagi jemaat di Roma bukanlah berarti ketundukan yang dikarenakan ketakutan akan represi kekuatan militer Roma.

Tujuan Allah adalah agar kehidupan manusia dalam masyarakat merupakan kehidupan yang penuh keharmonisan, kedamaian dan ketertiban (Lih. Roma 12:10,18). Pertanyaan kritis berikutnya adalah “bagaimana dengan konteks pemerintahan di Indonesia?” jika mengacu pada konteks Roma seperti yang di atas tentunya pemerintah Indonesia sedang tidak berjalan sesuai dengan perpanjangan tangan Allah. Namun penulis ingin menekankan bahwa, pada mulanya Indonesia sudah memiliki dasar ideologi yang mencakup semua golongan, sehingga dapat dikatakan disanalah perpanjangan tangan Allah bekerja. Seperti Allah menurunkan sepuluh perintah Allah kepada Musa. Allah juga menurunkan Pancasila melalui para pendiri bangsa yang dibuat disesuaikan dengan konteks bangsa Indonesia. Sehingga sebagai bagian dari negara Indonesia baik berupa golongan/kelompok maupun Individu sangat tidak diperbolehkan untuk berniat maupun berusaha untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah untuk memaksakan kehendak dari komunitas maupun individu. Demikianlah refleksi iman penulis dalam kaitannya dengan Skripsi yang telah penulis paparkan di atas.

Daftar Pustaka Cetak/Buku:

- Anggraeni, Kusumawardani & Faturochman. *Nasionalisme* (Buletin Psikologi, Tahun XII, No. 2, Desember 2004).
- Bolo, A. Doweng dan tim. 2016. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius
- Charles E, Curran. 2002. *Catholic Social Teaching 1891-present: a historical theological and ethical analysis*. Washington, D.C: Georgetown University Press
- Chung, Paul. S. 2010. *Public Theology in an Age of World Christianity*. New York: St. Martin's press LLC
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F. Budi., 2010. "Komersialisasi Ruang publik menurut Hannah Arendt dan Habermas", dalam dalam *Ruang Publik: Melacak partisipasi Demokratis dari sampai F. Budi Hardiman*, Yogyakarta: Kanisius, Jürgen polis
- Hardiman, F. Budi 2013. *Dalam moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Jung Young Lee, 1979. *The Theology of Change*, Orbis Books, Maryknoll, NY.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2014. *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Menoh, Gusti A., 2015. *Agama dalam Ruang publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam masyarakat postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Max Weber. 1958. *The Protestant ethic of Spirit Capitalism*, New York, Scribner. Edisi Inggrisnya dikerjakan oleh Talcot Parson dengan Pengantar RH Tawney.
- Paul, Vallely (ed). 2007. *Cita Masyarakat Abad 21: visi gereja tentang masa depan*. Yogyakarta: Kanisius
- Pieris, Aloysius., 1996. *Berteologi dalam Konteks Asia*, Yogyakarta: Kanisius,
- Sastrapratedja, 1993, *Manusia Dalam Pijar-Pijar Kekayaan Dimensinya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Stout, Jeffrey, 2004, *Democracy and Tradition*, Princeton: Princeton University press.
- Sulasmono, Bambang Suteng. 2015. *Dasar Negara Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius,
- Suwarno, P. J. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Daftar Pustaka Online

<https://seword.com/sosbud/menyimak-fenomena-ahok-dalam-pilgub-dki-jakarta-2017/>

<http://www.dw.com/id/pilkada-jakarta-tolok-ukur-pertarungan-politik-jelang-pemilu-nasional/a-37531492>

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>

<https://seword.com/sosbud/menyimak-fenomena-ahok-dalam-pilgub-dki-jakarta-2017/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170514180107-20-214749/masyarakat-indonesia-di-canberra-hapus-pasal-penodaan-agama>

<http://news.liputan6.com/read/2981554/jurus-jokowi-menjaga-pancasila>

<http://www.viva.co.id/siapa/read/443-yudi-latif>

<http://www.lutheranupress.org/paul-s-chung>

<https://nasional.tempo.co/read/1045161/kaleidoskop-2017-setelah-pilkada-rasa-sara-dan-politik-identitas>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/26/08342321/isu-sara-di-arena-politik-2017-akankah-terulang-di-2018>

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39626091>

<http://news.liputan6.com/read/2882270/jenazah-nenek-hindun-ditелantarkan-warga-setelah-pilih-ahok>

<https://seword.com/politik/banyak-indikasi-kecurangan-di-pilkada-dki-kpud-ngomongnya-begini-doang>